

MIGRASI PADA MASYARAKAT BALI KUNA

Oleh : I Gusti Made Suarbhawa

I

Dewasa ini pemerintah sedang giat melaksanakan program pemindahan penduduk dari suatu daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk jarang. Kegiatan ini dikenal dengan nama transmigrasi. Pelaksanaan transmigrasi ada bermacam-macam, antara lain transmigrasi umum, transmigrasi spontan, transmigrasi swakarsa, dan lain sebagainya. Pada hakikatnya program transmigrasi bertujuan untuk pemeratakan persebaran penduduk dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Bila direnungkan sejarah perkembangan kehidupan manusia dari waktu ke waktu, jelas sekali manusia selalu ingin meningkatkan harkat dan taraf hidupnya. Untuk itu ditempuh berbagai macam alternatif yang dipandang mungkin, antara lain ialah perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain yang dikenal dengan nama migrasi.

Masalah migrasi telah banyak menarik perhatian para pakar ilmu-ilmu sosial dan ahli-ahli demografi. Pada umumnya mereka lebih banyak menelaah migrasi yang terjadi setelah zaman kolonial, khususnya masalah-masalah yang berkenaan dengan *push-pull factor migrasi* (Parsudi Suparlan, 1991 : 45). Namun seperti diketahui, migrasi sudah terjadi jauh sebelum zaman kolonial. Harus diakui, bahwa masalah migrasi pada zaman Indonesia kuna relatif sedikit ditelaah oleh para pakar.

Telaah perpindahan penduduk walaupun cukup menarik, namun relatif kurang men-

dapat perhatian dalam kajian Sejarah Indonesia. Hal ini mudah difahami, karena data tektual yang tersedia mengenai aspek ini, relatif sedikit. Agak berbeda dengan telaah aspek kehidupan sosial-ekonomi, terutama yang berhubungan dengan penyelenggaraan perpajakan, telah mendapat kajian relatif banyak dari para pakar Sejarah Indonesia Kuna. Masalah sosial-religi juga mendapat perhatian yang relatif luas, berupa kajian proses awal atau masuknya Hinduisme ke Indonesia dan pertumbuhannya. Demikian pula telaah mengenai kehidupan sosial-politik periode Indonesia Kuna yang banyak berkaitan dengan aspek-aspek yang bersifat *historikal-prosesual* dan *historikal-struktural*, mendapat perhatian cukup luas. Adalah wajar jika aspek-aspek ini mendapat perlakuan demikian, karena data-data tektual yang tersedia memberikan informasi yang cukup luas.

Tulisan ini tidak berpretensi mengungkap segala aspek perpindahan penduduk. Kelemahan dalam pembahasan ini, ialah tidak mampu menjelaskan secara pasti mengenai proses, pola dan karakteristik perpindahan penduduk, serta berapa jumlah penduduk yang melakukan perpindahan. Namun demikian, akan dibahas salah satu elemen dari topik ini yakni motivasi perpindahan penduduk pada masyarakat Bali kuna, terutama ditinjau dari segi ekonomi dan non-ekonomi sebagai penyebab kepindahan mereka. Dengan demikian, pembahasan lebih ditekankan pada penjelasan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya

perpindahan penduduk pada zaman Bali Kuna. Data yang digunakan dalam tulisan ini bersumber dari data prasasti-prasasti, naskah-naskah kesastraan, dan karya-karya tulis para pakar yang ada kaitannya dengan telaah ini.

II

Migrasi penduduk, merupakan suatu bentuk respon dari adanya variasi keadaan lingkungan pada tempat mereka hidup. Keadaan alam yang setiap saat berubah, adanya perubahan dalam kehidupan sosial-politik, fluktuasi kondisi ekonomi, dan perkembangan penduduk melalui proses kehidupannya mengakibatkan penduduk berpindah dari suatu tempat ke tempat lain.

Parsudi Suparlan (1991 : 45-47) menyatakan, bahwa pada umumnya motivasi migrasi penduduk ialah karena faktor desakan ekonomi. Mereka meninggalkan desa pergi ke kota, sebagian besar bertujuan untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kecendrungan ini didasarkan atas perbedaan ekonomi antara kota dengan pedesaan. Di kota, terdapat kesempatan ekonomi yang lebih baik dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Keanekaragaman kegiatan ekonomi di kota, dimungkinkan oleh kepadatan penduduk yang relatif lebih tinggi daripada yang terdapat di pedesaan, dan oleh kompleksnya struktur sosial.

Masyarakat Indonesia Kuna (Jawa dan Bali), terutama yang tinggal di daerah persawahan di pedalaman sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu. Para petani sawah yang tinggal di pedalaman Pulau Jawa dan Bali merupakan hampir setengah dari penduduk Indonesia. Menurut ukuran zaman-

nya, desa-desa di pedalaman itu umumnya relatif besar dan penduduknya relatif rapat. Dengan kondisi yang demikian, maka tekanan penduduk meningkat menjadi sulit dikendalikan, dan akibatnya timbul desakan ekonomi (Geertz, 1983 : 38-48).

Perlu diperhatikan, bahwa migrasi penduduk tidak semata-mata dilandasi oleh faktor ekonomi, tetapi faktor non-ekonomi juga memberi pengaruh. Demikian pula halnya yang terjadi pada masyarakat Bali Kuna yang melakukan migrasi tidak semata-mata dimotivasi oleh faktor ekonomi saja, melainkan juga didasari oleh faktor-faktor lain.

III

Berbagai prasasti memuat keterangan tentang migrasi masyarakat Bali Kuna, baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagian besar menyebutkan perpindahan penduduk dari suatu desa ke desa lain atau suatu desa didatangi oleh penduduk dari desa atau tempat lain. Misalnya prasasti Celepik A. atau Klungkung A. yang dikeluarkan oleh raja Anak Wungsu pada tahun 994 S (1072 M) disebutkan : *Iib. 6. . . . mangkana yan hana rowang (6) nya sapurusakara, lung-hamgil maring thāni salen tan wehēn ya kumawasakna sawah ginawainya, . . .* (Callenfels, 1926 : 60). Prasasti Bugbug (Budiastra, 1977 : 12) menyebutkan : VIIa. 1. . . . *nguniweh yan hana wwang karāman i bugbug lunghangalih saporanya, manahura ya tulak sambwang mā 4 irikanang karāman, . . .* Keterangan serupa juga dimuat dalam prasasti Srokadan A. yang dikeluarkan oleh Sang Ratu Sri Ugrasena pada tahun 837 Saka atau 915 Masehi, II. 3. . . . *anada tua anak manglamsuan mangdarat marparlak*

(4) *ka ditu, an takkaanna ya pangrama māspi 2 dihadiri atmuangatmuang tani kawakatan di parawuluwulu* (Goris, 1954 : 63). Keterangan yang tidak jauh berbeda terdapat dalam prasasti Tulukbyu A. atau Batur, Pura Abang A. yang dikeluarkan oleh raja Sri Dharmodayana Warmadewa pada tahun 933 Śaka (Goris, 1954 : 91) disebutkan : VIa. 3. . . . , *mwang yan hana wwang ri thani salen angungsir momah ngkana, tan syutēn, haywahaywana i pāduka haji, ring mahga mahā* (4) *nawami, . . .* Dan masih banyak lagi prasasti yang memuat keterangan serupa.

Ada kalanya disebutkan perpindahan penduduk menuju suatu tempat dilakukan oleh golongan pendeta (*bhikṣu*). Biasanya tujuan mereka ke tempat-tempat suci seperti pertapaan. Misalnya disebutkan dalam prasasti Bangli, Pura Kehen A. (5) . . . , *anāda tua bhikṣu musirang ya marumah ditu katu* (6) *rutan ya kobhayadharmmān pamasamahyan panghlaryan di dangudu kibhaktyan di hyang karimama, . . .* Hal serupa juga dimuat dalam prasasti Dausa, Pura Bukit Indrakila AI. yang dikeluarkan oleh Sri Ugrasena di *Panglapuan Singhamandawa* pada tahun 857 Śaka (Goris, 1954 : 69) disebutkan : Ib. 5. . . . , *anada tua* (6) *bhikṣu grama, musirang ya marumah ditu kobhayadharmman ya pamasamahyan pahlaryan di sattrā di hyangāpi di ruang ditu, . . .*

Prasasti Tejakula yang bertahun 1077 Śaka dari masa pemerintahan raja Ragajaya memberi keterangan, bahwa yang melakukan perpindahan berasal dari kaum budak (Ginarsa, 1974 : 20), disebutkan : Vb. 4. . . . , *mangkana yan hana raray kawula tkeng ahutang pradhana, angungsi ri sabhaya, tan alapēn deni rahadyanya, tan*

tawan walatungēn, tan iwakhyangēn, ta (5) *n papatihakna, tuhun amukahana mā 4 ring hutang satahil, tarakramaning hutangnyāngkēn tahun juga ya, tan lpihakna, tan kna kalāntara, yapwan hana sahasa* (6) *umalap hulunya, sampun winarahakēn mangungsir tan pamisinggih i sarasanyājnā paduka sri mahārāja, tan wurung dawuhana dēnda mā su 3 mā 2 atēhēr kahilangana* (7) *ring pihutangnya, . . .* Selain itu keterangan serupa juga termuat dalam prasasti Daya, prasasti Pengotan CII., prasasti Kintamani D., prasasti Kintamani E., dan beberapa prasasti lain.

Negarakrtagama pupuh XLII/1 menyebut, bahwa pada tahun 1206 Śaka (1284 Masehi) Kertanegara raja Singosari mengirimkan ekspedisi ke Bali. Ekspedisi ini berhasil dengan baik. Raja Bali ditawan dan dibawa ke Singosari, kemudian pemerintah Singosari mengangkat Śasa Bungalan sebagai raja mewakili Singosari di Bali (Pigeaud, 1960 : 32; Slametmulyana, 1979 : 294). Keberhasilan pasukan Singosari menundukkan Bali menyebabkan berpindahnya orang-orang Singosari ke Bali, dan beberapa di antaranya berhasil menduduki jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan, seperti tampak pada nama-namanya, yang kebanyakan memakai nama-nama binatang seperti yang lazim digunakan oleh pejabat-pejabat di kerajaan Singosari.

Data lain yang memberitakan terjadinya migrasi pada masyarakat Bali kuna juga dapat dilihat dalam Negarakrtagama pupuh XLIX/4. Disebutkan, bahwa pada tahun 1265 Śaka atau 1343 Masehi pulau Bali ditundukkan oleh tentara kerajaan Majapahit. Raja Bali yang berkelakuan jahat dan berbudi rendah dapat dibunuh beserta segenap

keluarganya (Pigeaud, 1960 : 36; Slametmulyana, 1979 : 297).

Dalam Usana Jawa disebutkan penyerangan tentara Majapahit ke Bali dipimpin oleh Gajah Mada dibantu oleh para satria Jawa atau para Arya. Untuk memegang pemerintahan, Gajah Mada atas nama kerajaan Majapahit menugaskan Dalem Ketut Śri Kṛṣṇa Kepakisan menjadi raja di Bali, dengan keraton di Samprangan. Dalam menjalankan pemerintahan Kṛṣṇa Kepakisan dibantu oleh para Arya yang berjasa menaklukkan pulau Bali, dan mereka ditempatkan di daerah-daerah. Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintahan yang semula berpusat di Samprangan dipindahkan ke Gelgel, yang kemudian dipindahkan lagi ke Klungkung (Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1978 : 59-62).

Sampai saat ini memang belum ditemukan data tekstual prasasti yang memberitakan gambaran yang agak jelas tentang perpindahan penduduk dari suatu desa ke pusat pemerintahan pada zaman Bali Kuna. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa pada masa itu tidak pernah terjadi perpindahan penduduk dari desa ke kota atau ke pusat kerajaan. Erat kaitannya dengan pusat pemerintahan sebagai salah satu tempat tujuan migrasi masyarakat Bali kuna, sampai saat ini belum diketahui dengan pasti di mana lokasi pusat kerajaan itu.

Dalam rentang waktu abad IX - XV Masehi pulau Bali diperintah oleh beberapa orang raja, di antaranya ada beberapa orang yang memakai gelar *Warmmadewa*, yang menunjukkan asalnya dari dinasti Warmmadewa. Di samping itu, ada pula raja-raja yang tidak menggunakan gelar Warmma-

dewa, yang oleh para ahli, diduga berasal dari wangsa lain. Dalam pergantian raja-raja, terjadi beberapa kali selang-seling dinasti. Dalam pergantian dinasti itu tidak jelas apakah disertai dengan kekerasan atau berlangsung dengan damai.

Terlepas dari masalah pergantian raja dan dinasti yang mungkin berlangsung secara damai atau dengan jalan kekerasan, maka bila diperhatikan ada beberapa prasasti yang menyebutkan nama tempat dikeluarkannya sebuah prasasti, yakni *panglapuan* di Singhamandawa. Menurut Goris (1948 : 10), *panglapuan* merupakan semacam mahkamah atau dewan penasehat pusat kerajaan. Dengan demikian *panglapuan* Singhamandawa, mengacu kepada pusat kerajaan. Di mana letak Singhamandawa, sampai saat ini belum dapat dijawab dengan pasti. Mungkin Singhamandawa terletak di antara Kintamani (danau Batur) dan pantai Sanur (Belanjong), yaitu kira-kira di daerah sekitar Tampaksiring dan Pejeng atau di antara aliran sungai Patanu dan Pakerisan (Bambang Sumadio, 1984 : 284).

Prasasti Julah atau Sembiran AI. yang berangka tahun 873 Śaka dari raja Ugrasena menyebutkan nama *panglapuan Brasabha* dan *panglapuan Baranasi*. Bertitik tolak dari pengertian *panglapuan* sebagai dewan penasehat pusat kerajaan yang mengacu kepada pusat kerajaan, maka timbul dugaan, bahwa Brasabha dan Baranasi juga merupakan nama tempat pusat pemerintahan. Mengikuti anggapan Brasabha dan Baranasi sebagai pusat kerajaan, permasalahannya akan terbentur juga kepada pencaharian lokasi kedua *panglapuan* itu.

Pergantian beberapa raja dari dinasti

yang berbeda dikaitkan dengan beberapa tempat yang mengacu kepada pusat pemerintahan, membayangkan terjadinya perpindahan pusat pemerintahan. Dugaan ini dilandasi oleh adanya perpindahan pusat pemerintahan dalam periode setelah penaklukan pulau Bali oleh Majapahit. Dengan adanya perpindahan pusat pemerintahan, tentu bukan hanya raja beserta para pejabat kerajaan yang berpindah, tetapi juga melibatkan para penduduk pada masa itu.

Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang migrasi pada masyarakat Bali kuna secara khusus, perlu dikemukakan pendapat R. von Heine Geldern (1972) tentang landasan kosmogonis kerajaan-kerajaan kuna di Asia Tenggara, yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap dinamika kehidupan masyarakat pada masa itu. Landasan kosmogonis tersebut ialah kepercayaan akan perlu adanya keserasian antara dunia manusia ini (mikrokosmos) dengan alam semesta (makrokosmos). Menurut kepercayaan ini, manusia selalu ada di bawah pengaruh kekuatan-kekuatan yang bersumber dari planet-planet dan bintang-bintang. Kekuatan ini dapat membawa kesejahteraan, kebahagiaan, dan perdamaian atau bencana kepada manusia, tergantung kepada dapat atau tidaknya individu, kelompok-kelompok sosial, terutama kerajaan, menyesuaikan hidup beserta segala aktivitasnya dengan alam semesta. Orang dapat memperoleh keserasian itu dengan mengikuti petunjuk-petunjuk astrologi, alamat-alamat yang menunjukkan akan datangnya bencana atau keberuntungan, dan perlambang-perlambang lainnya. Kerajaan juga dapat memperoleh keserasian dengan alam

semesta, jika disusun sebagai bayangan-nya, sebagai kosmos dalam bentuk kecil.

Menurut konsep kosmologis, arsitektur ibu kota kerajaan dibentuk sebagai gambaran dari jagat raya dan juga merupakan pusat jagat raya. Ibu kota kerajaan, tidak saja merupakan pusat politik dan kebudayaan dari suatu bangsa, tetapi iapun merupakan pusat magis dari kerajaan. Oleh Heine Geldern ditekankan, bahwa dalam konsep kosmologis, peranan raja adalah sebagai pusat dari jagat raya dan sebagai wakil dari dewa-dewa. Oleh karena raja dianggap sebagai wakil dewa, maka dengan berbagai cara iapun dilukiskan bersifat seperti dewa. Menurut kepercayaan Hinduisme, raja dianggap sebagai penitisan (inkarnasi) dari dewa ataupun sebagai keturunan dari dewa-dewa, atau sebagai keduanya, baik sebagai dewa maupun sebagai keturunan dewa. Raja-raja kebanyakan dianggap sebagai inkarnasi dewa Siwa dan Wisnu.

Berkait erat dengan konsep penguasaan alam raya, raja dianggap sebagai penguasa tertinggi dunia (kerajaan), yang juga merupakan pelindung dunia. Contoh penerapan konsep ini adalah seperti yang termuat di dalam prasasti Batunya B. tahun 1103 Saka (1181 M.). Disebutkan : *Ila. 2. . . . , gunagrāhi kuminkin ri kaswasthāka nikang rat rinakṣa nira, makadona ri pagēha nikang sapta nagara, swabhawani kadi sira prabhū cakra wartti (3) rājādirāja saikarājarajalakṣmi, pinaka ta patraning bhuwāna, umēbēnang sarwwa samasta jana satungkēb balidwipa maṇḍala, . . .* (Kartika, 1987 : 63).

Mengenai kedudukan raja sebagai penguasa dan pelindung dunia, dalam Rama-

wana Kakawin disebutkan kewajiban seorang raja, yaitu harus berpegang teguh kepada *dharmma*, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa, bijaksana dan tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak-gejolak di kalangan rakyatnya, berusaha agar rakyat senantiasa memperoleh rasa tenteram dan bahagia, serta dapat memperlihatkan wibawanya dengan kekuatan angkatan perang dan harta kekayaannya (Bambang Sumadio, 1984 : 192-193). Semua tindakan raja, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat termasuk penduduk di daerah pedesaan.

Dalam prasasti, ada dua bentuk yang disebut-sebut sebagai sumber penghasilan kerajaan. Pertama dalam bentuk yang disebut *drawyahaji* yaitu berupa berbagai macam pajak. Bentuk kedua yakni persembahan kepada raja berupa tenaga kerja sukarela atau persembahan lainnya. Persembahan semacam ini disebut *buat haji, buñcang haji* atau *gawai* (Bocchhari, 1981 : 67-68). Berbagai macam penghasilan kerajaan, di satu pihak sebagai kekayaan raja pribadi dan di lain pihak sebagai alat untuk kesejahteraan dan melindungi kerajaan. Sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat diwujudkan dalam mengupayakan berbagai fasilitas aktivitas pertanian, ekonomi, keagamaan dan fasilitas-fasilitas lainnya di dalam wilayah ke-*rajaan*.

Dalam pemungutan pajak, ternyata ada penyimpangan-penyimpangan. Para petugas sering membuat ulah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Penduduk desa sering merasa tidak puas, dirugikan dan menderita akibat tindakan para petugas pe-

mungut pajak. Tindakan demikian yang terjadi berulang kali, akan menimbulkan keresahan sosial terutama pada masyarakat pedesaan.

Data tekstual berupa prasasti dan naskah kesastraan sejauh ini, belum ada yang memberikan keterangan adanya protes atau pemberontakan dari penduduk suatu desa untuk melawan raja karena beratnya beban pajak ataupun beban lainnya. Bila penduduk suatu desa yang tidak mampu membayar pajak dan kewajiban-kewajiban tertentu, biasanya mereka akan memohon anugerah raja agar pajak dan kewajiban itu, dikurangi. Langkah yang paling ekstrim diambil oleh penduduk bila terjadi desakan ekonomi, desakan politik ataupun desakan lain, ialah mereka akan meninggalkan desanya menuju ke suatu tempat yang dipandang dapat meringankan bebannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat, bahwa penduduk suatu desa mengambil keputusan untuk melakukan migrasi disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, masalah ekonomi merupakan salah satu faktor yang menyebabkan migrasi. Di kalangan petani pedesaan, desakan ekonomi sering berkaitan dengan masalah lahan garapannya. Bukti-bukti prasasti menunjukkan, adanya para petani yang meninggalkan desanya menuju suatu desa atau tempat baru untuk membuka lahan, bahkan ada juga sebagai penggarap.

Di samping menyangkut permasalahan lahan garapan, desakan ekonomi juga bersangkutan paut dengan utang piutang. Sebagian penduduk pedesaan terpaksa harus meminjam barang atau uang kepada orang-

orang tertentu. Kehidupan peminjam relatif melarat, yang kadang kala mendapat tekanan dari si pemberi pinjaman. Demi mendapat keuntungan yang lebih banyak, si pemberi pinjaman sering melipatgandakan pinjamannya. Mendapat perlakuan yang demikian, maka para peminjam merasa sangat berat membayar utang. Untuk meringankan beban utang atau untuk menghindari tekanan dari si pemberi pinjaman, ada kalanya mereka pergi meninggalkan desanya ke desa lain ataupun ke tempat yang agak jauh.

Desakan ekonomi karena masalah lahan garapan dan utang piutang juga menyebabkan sebagian penduduk meninggalkan desa dengan tujuan ke kota ataupun ke pusat kerajaan. Dipilihnya kota sebagai sasaran migrasi, seperti telah disampaikan di depan, karena kesempatan ekonomi di kota lebih daripada di pedesaan. Di samping itu ada suatu kecenderungan untuk hidup berkelompok dan memusat di kota-kota dibandingkan dengan di pedesaan. Dengan tinggal di kota atau pusat kerajaan berarti semakin dekat dengan raja yang merupakan pelindung yang selalu mensejahterahkan seluruh negeri. Dekat dengan raja, memberikan rasa aman dan tenteram. Keadaan yang seperti itu memberikan peluang menuju perbaikan ekonomi.

Selain faktor ekonomi, migrasi penduduk juga disebabkan oleh masalah kepercayaan atau agama yang dianut, atau dengan kata lain disebut faktor religi. Dalam hal ini data menunjukkan secara khusus menyangkut para pemuka agama (*para bhiksu*) seperti yang tercermin dalam prasasti Sukawana AI., Dausa, Pura Bukit Indrakila AI., Goblek AI., dan prasasti

Bangli, Pura Kehen A. Perpindahan para pendeta tidak terlepas sama sekali dengan tugas yang disandangnya, karena tugas para pendeta tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang. Oleh karena itu, perpindahan itu didasari oleh rasa tanggung jawabnya sebagai pemuka agama, sehingga mereka harus pergi menuju suatu tempat tertentu. Di samping itu, biasanya di suatu tempat bila dipandang perlu oleh penguasa, akan di datangkan para pendeta atau pemuka agama. Biasanya mereka tinggal pada bangunan suci atau di sekitarnya, seperti pada pertapaan, wihara, candi, dan tempat-tempat semacam itu.

Tindakan kekerasan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi penduduk. Tindakan kekerasan sering dilakukan oleh para perampok atau kelompok-kelompok penjahat, begal, garong, dan sejenis itu. Mereka cukup kejam dan bertindak tidak tanggung-tanggung. Mereka sering menyerang penduduk suatu desa. Tindakan kekerasan itu, dalam prasasti disebutkan sampai mengakibatkan penduduk cacat, ada yang ditawan, bahkan ada yang terbunuh. Tidak cukup itu saja, ada kalanya tindakan kekerasan disertai dengan pembantaian dan pencurian binatang piaraan serta pembakaran rumah-rumah penduduk. Akibat tindakan yang demikian, maka cukup meresahkan penduduk pada masa Bali Kuna. Karena kondisi yang demikian rawan, sehingga mereka terpaksa memutuskan untuk pergi meninggalkan desa demi keselamatannya.

Tampaknya keputusan untuk meninggalkan desa seperti itu, kecuali karena faktor keamanan, juga dipengaruhi oleh suatu kepercayaan yang menurut B. Schrieke (1957)

disebut konsep *kaliyuga*. Menurut konsep ini, apabila ibu kota kerajaan pernah diduduki oleh musuh dalam masa peperangan, maka tidak baik (tabu) untuk menempati ibu kota itu, walaupun kemudian raja dapat mengalahkan musuhnya itu.

Penduduk yang meninggalkan desa menuju tempat yang baru dengan harapan mendapatkan masa depan yang lebih baik. Oleh karena itu ia akan berusaha untuk menemukan upaya ke arah itu. Dalam menjalani hidup di tempat yang baru paling tidak mereka harus mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi dalam pemukiman yang baru dibuka, tentu tidak sama dengan kondisi daerah atau desa yang sudah lama berpenduduk. Dalam pemukiman yang baru dibuka mereka lebih banyak beradaptasi dengan lingkungan alam. Sebaliknya bermukim di wilayah suatu desa selain beradaptasi dengan lingkungan alam, juga harus menyesuaikan diri dengan penduduk yang lama, antara lain menyangkut sikap hidup, adat istiadat, norma-norma kehidupan, pranata-pranata sosial, dan bentuk-bentuk kultur lainnya.

Harapan dalam perpindahan ini akan tercapai menurut Kartasaputra (1987 : 460) apabila perpindahan dapat berlangsung dengan selamat, dapat menyesuaikan diri pada tempat yang baru dan diterima dengan baik oleh penduduk di daerah yang baru. Sebaliknya perpindahan akan mengalami kegagalan atau kepahitan, karena kondisi alam ternyata meleset dari yang diperkirakan, tidak mampu beradaptasi dengan alam lingkungan atau juga penduduk di daerah baru tidak bisa menerima kedatangannya.

Keberhasilan mencapai harapan di tem-

pat tujuan, maka mereka cenderung untuk menetap di tempat itu, dan sebaliknya, apabila gagal, ia akan meninggalkan tempat itu menuju tempat yang baru atau kembali ke asal. Kembalinya ke tempat asal mungkin direncanakan sebelumnya atau ada pihak lain yang menghendaki. Gejala kasus pertama seperti terlihat dalam prasasti Timpag, sedangkan kasus kedua jelas terlihat dalam prasasti Sembiran AII., disebutkan penduduk desa Julah yang mengungsi ke suatu tempat karena diserang musuh disuruh kembali ke desanya oleh raja Ugrasena. Peristiwa yang serupa termuat juga dalam prasasti Cempaga C dan prasasti Bangli, Pura Kehen C.

IV

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan, bahwa penduduk Bali kuna melakukan perpindahan dari tempat asalnya menuju ke tempat-tempat baru, ke desa-desa lain, tempat pemukiman yang baru, kota-kota ataupun ibu kota kerajaan. Setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan perpindahan mereka pada masa itu. Pertama, faktor ekonomi baik yang menyangkut masalah lahan garapan, utang piutang, dan berbagai macam pajak yang cukup berat. Kedua, perpindahan penduduk berkaitan dengan faktor religi khususnya berlaku di kalangan para pendeta atau pemuka agama. Faktor ketiga, perpindahan penduduk karena adanya tindakan kekerasan dari pihak-pihak tertentu.

Dari data yang tersedia memang agak sulit untuk menentukan faktor-faktor mana yang lebih dominan yang mendorong terjadinya migrasi. Mungkin antara satu faktor dengan faktor yang lain saling berkait dan

saling berpengaruh. Dilihat dari rentang waktu, perpindahan yang mereka lakukan ada yang bersifat sementara, dalam artian pada kurun waktu tertentu mereka akan kembali ke daerah asalnya. Selain itu, ada juga yang bersifat permanen, yakni mereka tinggal menetap di daerah tujuan yang baru.

Pembahasan yang lebih luas dan mendalam dengan menggunakan teori-teori yang dapat diterapkan pada masyarakat-masyarakat kuna yang ditunjang oleh data yang lebih banyak baik berupa data tekstual prasasti, naskah kesastraan, dan karya-karya tulis lainnya, diharapkan tidak hanya dapat menentukan faktor yang lebih dominan, tetapi juga menemukan faktor-faktor lain. Selain itu diharapkan pula mampu menjelaskan pola dan karakteristik dan proses dari perpindahan penduduk.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sumadio (editor), *Jaman Kuna*. Jakarta : Balai Pustaka, 1984.
- Bocchhari, "Some Considerations of the Problem of the Shift of Mataram's Center of Government from Central to East Java in the 10th Century A.D.", *Bulletin of Research Center of Archaeology of Indonesia*, 10, Jakarta : Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional, 1976.
- Bocchhari, "Ulah para Pemungut Pajak di dalam Masyarakat Jawa Kuna", *Majalah Arkeologi*, IV (1-2), 1981, hal. 67-87.
- Brandes, J.L.A., "De Bronzen platen van Sembiran (Boecleng) Bali", *TBG*, XXXVII, 1889, hal. 16-56.
- Budiastra, Putu, *Empat Lembar Prasasti Raja Jayapangus*. Denpasar : Museum Bali, 1977.
- Budiastra, Putu, *Prasasti Dewa Bugbug*. Denpasar : Museum Bali, 1977.
- Budiastra, Putu, *Prasasti Timpag*. Denpasar : Museum Bali, 1977.
- Budiastra, Putu, *Prasasti Pura Bale Agung Kintamani*. Denpasar : Museum Bali, 1985.
- Geertz, Clifford, *Involusi Pertanian*. Terjemahan S. Supomo. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1983.
- Ginarsa, Ktut, *Prasasti Baru Raja Ragajaya*. Singaraja : Lembaga Bahasa Nasional Cabang I, 1974.
- Ginarsa, Ktut, "Ekspedisi Gajah Mada ke Bali", *MISI*, VII (1), 1977, hal. 27-65.
- Goris, R., *Sedjarah Bali Kuna*. Singaraja, 1948.
- Goris, R., *Prasasti Bali* I. Bandung : NV. Masa Baru, 1954.
- Goris, R., *Ancient History of Bali*. Denpasar : Faculty of Letters Udayana University, 1965.
- Heine Geldern, R. von, *Konsepsi tentang Negara dan Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Terjemahan Deliar Noer. Djakarta : Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 1972.

- Kartasaputra, G., *Sosiologi Umum*. Jakarta : Bina Aksara, 1987.
- Kartika, I Nengah, *Prasasti Batunya dari Raja Jayapangus*, Skripsi Sarjana Fakultas Sastra Universitas Udayana, 1987.
- Parsudi Suparlan, "Gelandangan : Sebuah Konsekuensi Perkembangan Kota", *Gelandangan, Pandangan Ilmuan Sosial*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1991.
- Pigeaud, Th. G. Th., *Java in the Fourteenth Century : A Study in Cultural History*. The Nāgara Kertāgama by Raka-wi Prapanca of Majapahit, 1365 A.D. The Hague, Martinus Nijhoff, 1960-1963, 5 vols.
- Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, *Sejarah Daerah Bali*. Jakarta : Depdikbud, 1978.
- Schrieke, B.J.O., *Indonesian Sociological Studies*, Part two : Ruler and Realm in Early Java. The Ague/Bandung : W. van Hoeve, 1957.
- Slametmulyana, *Nagara Kretagama dan Tafsir Sedjarahnya*. Jakarta : Bhratara Karya Aksara, 1979.
- Stein Callenfels, P.V., "Epigraphia Balica", *VBG*, 66, 1926.

